

## PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PENYENGAT OLAK KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

Citra Darminto<sup>1</sup>, Haryadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: darmintocitra2014@gmail.com, haryadifh@yahoo.co.id

Diterima 15 Agustus 2019/Disetujui 22 Agustus 2019

### ABSTRAK

Pendampingan optimalisasi pengelolaan BUMDes bertujuan untuk memberi masukan atas kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang belum optimal. Kegiatan PKM melalui pendampingan dan pelatihan pengelolaan BUMDes Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdiri atas 3 tahapan, yaitu: 1) melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada; 2) kegiatan PKM dimulai pada bulan Maret s.d Juni, dengan kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan. Pelatihannya dilakukan tanggal 20 Juni 2019; dan 3) kegiatan evaluasi PKM untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengabdian. Kegiatan PKM melalui transfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BUMDes yang dikembangkan sebagai aset. Pengelolaan BUMDes mengarah pada penggunaan konsep berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, berdampak pada terbentuknya potensi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar, yaitu adanya usaha baru seperti UMKM dan tempat wisata yang dijadikan sumber perekonomian masyarakat dan berkontribusi bagi BUMDes. Maka, pengelolaan BUMDes merupakan salah satu cara mengatasi persoalan ekonomi masyarakat akibat situasi global. Sehingga, kegiatan pendampingan masyarakat selain tranfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan lebih lanjut dalam membangun jejaring dengan berbagai *stakeholder* penting untuk dilakukan.

**Kata Kunci:** *pendampingan, optimalisasi, BUMDes*

### PENDAHULUAN

Kemajuan dan kemandirian suatu daerah dapat tercapai dengan mengupayakan pengembangan yang ada di daerah tersebut. Maka, strategi pemerintahan yang ada perlu dimaksimalkan sedemikian rupa, sehingga capaiannya dapat maksimal untuk mendukung peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya otonomi daerah membuat penyelenggaraan daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, mengetahui dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai daerah otonom baru yang diberi kuasa penuh untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan seluas-luasnya, diberi kewenangan mengatur dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menggeser peran desa yang semula sebagai *local state government* menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*. Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga mampu mewujudkan perannya sesuai amanat otonomi desa (Nilawati, 2018). Adanya otonomi desa, menjadikannya memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pelayanan publik mencakup aspek yang menjadi kepentingan masyarakat desa, sehingga diperlukan lembaga dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan usaha yang menjadi potensi dari desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi masyarakat agar berjalannya program dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat

dominan untuk menumbuhkan percepatan perekonomian masyarakat. Adanya UU otonomi desa menjadikan masyarakat desa menuju taraf yang lebih baik. Sehingga muncul tata kelola masyarakat desa yang lebih partisipatif dan akuntabel dalam memenuhi perekonomian menuju kesejahteraan.

Otonomi desa menjadikan desa dapat mandiri pada berbagai aspek demi tercapainya kebutuhan masyarakat sesuai potensi yang ada di desa. Pengoptimalan potensi desa, dapat mengurangi beban pemerintah pusat, sehingga desa dapat mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian desa tidak terlepas dari pengelolaan desa oleh seperangkat pemerintahan desa yang berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan amanah masyarakat. Terwujudnya kemandirian desa demi tercapainya desa yang sejahtera, membuat desa mencari dana sendiri dengan mengelola serta mengembangkan potensi di desa, sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mendapat bantuan dari APBN pusat yang dikenal dengan ADD (Alokasi Dana Desa). Namun bukan hanya menerima dan mengandalkan hibah dari APBN semata, desa perlu mengembangkan keuangannya dengan mengembangkan potensi desa, baik SDA maupun SDM, guna mencapai pendapatan asli desa yang maksimal.

Pembangunan desa dapat dicapai dengan pengelolaan yang baik dari keuangan desa tersebut. Pada dasarnya bantuan pendapatan asli desa masih berorientasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, pengelolaan dan pembangunan desa tidak akan maksimal. Maka, desa perlu mengembangkan pengelolaan pendapatan asli desa. Untuk itu desa dianjurkan mendirikan BUMDes sesuai kepentingan masyarakat desa. Landasan mendirikan BUMDes adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang termuat dalam pasal 87 mengenai BUMDes (UU, 2004).

Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dan mengatur perekonomian desa sesuai kepentingan masyarakat. Adanya BUMDes, menjadikan pemerintahan desa turut serta berkecimpung dalam penguatan perekonomian masyarakat untuk membantu pemerintah pusat. Desa tidak hanya menerima bantuan, namun diharapkan dapat mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa, sehingga pengembangan BUMDes adalah bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai potensi desa. Selain itu, BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Maka, penguatan dan pengelolannya diperlukan sebagai agen dalam menunjang perekonomian masyarakat. Pelaksanaan dan pemberdayaannya perlu pendekatan dalam kelompok masyarakat, bukan hanya individual namun juga menyeluruh di lapisan masyarakat desa.

Pada tahun 2017 keberadaan pendapatan asli Desa Penyengat Olak masih belum memenuhi target maksimal, karena BUMDes yang dibentuk belum mengalami perubahan yang signifikan sehingga berdampak pada pendapatan asli desa. Seiring berjalannya waktu dan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, pada tahun 2018 dibentuk BUMDes yang diharapkan dapat menjadi penyalur dan penguatan serta kesejahteraan masyarakat desa Penyengat Olak (tokoh adat, 2019). Kegiatan yang dilakukan BUMDes ini bergerak dibidang *cathering*, sewa menyewa gor, pemberdayaan bagi kaum wanita, serta pemberdayaan teknisi otomotif. Adapun program yang dibina masih berjalan masif dan belum maksimal serta pengelolaan BUMDes juga belum terarah dan belum maksimal, sehingga menghambat penguatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai solusi dan penyelesaian yang jelas dalam mengelola BUMDes, yang berdampak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa Penyengat Olak Kec. Jambi luar Kota, Kab. Muaro Jambi.

## TUJUAN DAN LUARAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui Pendampingan dan Pelatihan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah untuk memberi masukan atas kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes yang belum optimal. Sehingga, BUMDes di Desa Penyengat Olak dapat berjalan dengan baik dan optimal serta mampu meningkatkan pendapatan dalam pengelolaan BUMDes. Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini adalah berupa dokumentasi seperti foto, video cara pengelolaan BUMDes, video pelatihan PKM, hasil kegiatan PKM yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN, baik cetak maupun online dan dipublikasikan pada media massa berupa koran, baik cetak maupun online.

## METODE PELAKSANAAN

Adapun tahapan dalam kegiatan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes adalah: 1) mengidentifikasi pengelolaan BUMDes di Desa Penyengat Olak; 2) memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa; dan 3) mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki desa. Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian sosialisasi tentang pentingnya masyarakat dalam mengoptimalkan BUMDes. Pada tahapan ini, dosen, mahasiswa dan *stakeholder* terlibat secara langsung dalam kegiatan.

Kegiatan PKM ini diharapkan mampu mengubah pola pikir dan pola tindak masyarakat desa tentang partisipasi pengelolaan BUMDes, dapat mengatasi persoalan BUMDes, serta dapat memberdayakan elemen masyarakat di desa Penyengat Olak, bisa dari kaum muda dengan karang tarunanya, kaum perempuan Desa Penyengat Olak atau elemen lainnya di desa yang sanggup mengelola BUMDes yang dilakukan secara kontinyu. Oleh karena itu, mahasiswa akan diberikan pembekalan oleh dosen pembimbing lapangan tentang urgensi optimalisasi pengelolaan BUMDes dan target yang akan dicapai melalui program ini. Sedangkan untuk analisis data menggunakan pendekatan kualitatif (Akbar Yanuar, 2012).

## WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan PKM melalui pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan BUMDes Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdiri atas 3 tahapan, yaitu: 1) melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada; 2) kegiatan PKM dimulai pada bulan Maret s.d Juni, dengan kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan. Adapun Pelatihan Pengelolaan BUMDes dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019; dan 3) kegiatan evaluasi PKM untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengabdian ini.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan PKM diawali dengan riset pendahuluan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pengabdian. Pada proses riset ditemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDes Penyengat Olak, yaitu sulitnya merubah pola pikir masyarakat, apa lagi ditengarai adanya ego serta rasa acuh terhadap program yang ada dari desa. Muncul isu adanya golongan yang belum mau untuk saling berkontribusi bersama, banyaknya program yang dijalankan dari BUMDes Penyengat Olak, masyarakat hanya mengetahui adanya BUMDes di desa, namun dalam penyelenggaraannya masyarakat tidak mengetahui program apa saja yang dijalankan, bahkan tidak adanya sosialisasi mengenai BUMDes, baik dari RT atau pengelola BUMDes sendiri (Tego, 2019). Oleh karena fakta

lemahnya tata kelola BUMDes dan minimnya penyebarluasan informasi, maka kegiatan ini difokuskan untuk menyelesaikan kedua persoalan tersebut.



Gambar 1. BUMDES Mart



Gambar 2. Agen BRI Link BUMDes

Atas dasar paradigma di atas, kegiatan PKM ini juga menggunakan pendekatan *bottom up*, sejalan dengan pembangunan yang sedang dilakukan oleh Indonesia yang dimulai dari pinggiran dengan memperkuat desa melalui pendanaan dana desa. Sehingga, desa memiliki kesempatan yang besar untuk merencanakan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes berkelanjutan (Widayanti, 2012).

Pada bulan Maret s.d Juni, kegiatan PKM menekankan pada aspek: 1) penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber daya, seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan/fasilitas, yang dilakukan melalui pendampingan berupa Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan BUMDes yaitu dengan pengorganisasian BUMDes, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, pengendalian dan penyebarluaskan informasi potensi Desa Penyengat Olak; 2) pengembangan potensi SDM maupun kelembagaan masyarakat, berupa pelatihan, pendampingan dan demonstrasi; dan 3) penyertaan masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan, dengan menggunakan paradigma *people-based and people-oriented development* yang dilakukan melalui curah pendapat, berdiskusi, musyawarah dan menentukan kebijakan pengelolaan BUMDes (Taufiqurohkhman, 2016).



Gambar 3. Pelatihan Pengelolaan Bumdes



Gambar 4. Mengunjungi Salah Satu Usaha BUMDes

Pasca pelaksanaan kegiatan PKM, dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat capaian program yang telah direncanakan. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengetahuan tersebut disertai peningkatan motivasi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan melalui adanya keterlibatan aktif masyarakat seperti penyediaan Mni Market dan UMKM Desa Penyengat Olak.

Kemampuan manajerial dan kecakapan teknis dalam pengelolaan BUMDes juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan aktifitas promosi melalui saluran komunikasi baru. Promosi potensi yang dimiliki Desa Penyengat Olak melalui media baru yang populer mulai intensif disertai konten yang informatif, namun penggunaan wadah baru perlu mendapat perhatian lebih karena konten yang disajikan masih kurang menarik. Begitu pula dengan ketersebaran informasi,

informasi belum tersebar secara massif melalui jejaring saluran komunikasi dengan pengguna media yang sudah populer. Aktivitas pendampingan pengelolaan BUMDes berdampak pada peningkatan jumlah UMKM di Desa Penyengat Olak, keberadaan BUMDes memberi pengaruh terhadap usaha masyarakat yang menjadi bagian dari aktifitas UMKM, masyarakat desa melakukan aktifitas baru seperti kerajinan tangan, makanan, souvenir, serta pembangunan objek wisata yang masih dalam tahap pembangunan. Maka, adanya aktifitas baru akan melahirkan sumber perekonomian baru atau alternatif bagi masyarakat setempat yang selama ini bergantung pada sektor perikanan dan pertanian yang akan berdampak langsung bagi pemasukan BUMDes yang mengelola potensi yang saat ini dimiliki oleh masyarakat Desa Penyengat Olak.

### SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM melalui transfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BUMDes yang dapat dikembangkan sebagai aset. Pengelolaan BUMDes mulai mengarah pada penggunaan konsep berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, berdampak pada terbentuknya potensi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar, yang terlihat dengan adanya usaha baru seperti UMKM dan tempat wisata yang mulai dijadikan sumber perekonomian masyarakat dan berkontribusi bagi BUMDes. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat merupakan salah satu cara mengatasi persoalan ekonomi masyarakat akibat situasi global. Pengelolaan BUMDes membutuhkan kemampuan kerjasama dan jejaring yang baik untuk menunjang keberlanjutan BUMDes Penyengat Olak. Maka, kegiatan pendampingan masyarakat selain tranfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan lebih lanjut dalam membangun jejaring dengan berbagai stakeholder penting untuk dilakukan.

### REFERENSI

- Akbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Amir, M. Taufiq. 2011. *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, R. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Indonesia. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Kencana, Novia. 2013. *Konsep, Prinsip, Model dan Tujuan Manajemen Strategis Sektor Publik*. Palembang: Universitas Indo Global Mandiri.
- Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 296.
- Sesung, Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T., Wulandari, Y. 2017. *Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri*. Indonesia Journal If Community Engagement, 2(2), 146-162.
- Suyanto, Bagong., dkk. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Wawancara bersama tokoh adat, tanggal 12 Februari 2019 di kediaman pak Mahbub.
- Wawancara dengan bapak Tego selaku warga masyarakat, tanggal 29 Mei 2019.
- Widayanti, S. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*. Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1(1), 87-102.
- Zakaria, F., Suprihardjo, R. D. 2014. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan*. Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 245-249.